

Editor: B. Purnomo, S.H., M.M., M.H.



Buku Bunga Rampai

MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes., Efendi, S.Sos., M.A.P.



MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN

**Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Efendi, S.Sos., M.A.P.**



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN

Tim Penulis:

**Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Efendi, S.Sos., M.A.P.**

Editor:

B. Purnomo, S.H., M.M., M.H.

ISBN: 978-623-167-998-7

Design Cover:

Yasya Najmihuna A

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

**Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388**

**Penerbitan Buku ini atas Kerja Sama
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp (021) 5715 349 Fax (021) 5715 423 / 5715 925,
website: www.dpr.go.id**

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2024

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun
tanpa izin penerbit**

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas berkatnya tersebut, kita masih sehat walafiat sampai hari ini.

Sebagai bagian dari upaya untuk terus memberikan kontribusi positif dalam bidang ketenagakerjaan, kami dengan bangga mempersembahkan buku bunga rampai dengan bertema “MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN.” Buku ini merupakan salah satu produk dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada 2024, yang ditulis oleh tiga orang Analis Legislatif dan seorang Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan keahlian dan pengalaman yang mendalam di bidangnya.

Bagian pertama, berjudul “Upah dan Kesejahteraan Pekerja”, ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini membahas hubungan antara upah dengan kesejahteraan pekerja secara komprehensif. Bagian kedua, berjudul “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan”, ditulis oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si., Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini mengupas tuntas isu kesenjangan gender dalam pengupahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bagian ketiga, berjudul “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi”, ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes., Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini menyoroti tantangan dan solusi dalam sistem pengupahan bagi SDM Kesehatan. Bagian keempat, berjudul “Pengupahan Fleksibel (*Earned Wage Access - Ewa*) sebagai Alternatif Pembayaran Upah”, ditulis oleh Efendi, S.Sos., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini memperkenalkan konsep EWA sebagai alternatif pembayaran upah yang inovatif.

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan masukan pemikiran bagi Komisi IX DPR RI dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, khususnya ketenagakerjaan terkait upah pekerja. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menambah wawasan para pembaca dalam memahami permasalahan upah pekerja.

Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para penulis. Para penulis telah bekerja keras dan serius menyelesaikan penulisan buku ini di tengah kesibukan tugas-tugas lainnya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca. Saya berharap buku ini memberikan wawasan mendalam tentang sistem pengupahan yang berkeadilan, sehingga pembaca dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendukung kebijakan yang lebih adil.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Juni 2024

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

KATA PENGANTAR
KETUA MAJELIS KEHORMATAN & KOMISIONER
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR PEMBERI KERJA
2024-2029

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Berkat rahmat-Nya, kita berada dalam kondisi sehat walafiat dan tetap produktif berkarya.

Masalah upah pekerja selalu menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan. Setiap saat, pekerja menyuarakan tuntutan kenaikan upah yang adil bagi pekerja, sementara pengusaha harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keberlanjutan operasional perusahaan. Di sisi lain, kebijakan upah pekerja melibatkan berbagai aspek dan sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Buku bunga rampai "MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN" yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 ini memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek pengupahan pekerja. Buku ini terdiri dari empat bagian dari berbagai perspektif.

Bagian pertama, "Upah dan Kesejahteraan Pekerja" yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. merupakan bagian yang menarik untuk dicermati. Penulis membahas hubungan antara upah yang layak dengan kesejahteraan pekerja. Upah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan dampaknya terhadap produktivitas.

Bagian kedua, "Kesenjangan Gender dalam Pengupahan" yang ditulis oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si. menyoroti pentingnya kesetaraan upah pekerja laki-laki dan perempuan. Meskipun berbagai regulasi telah menjamin hal tersebut, faktanya ketimpangan masih terjadi dan perlu perhatian lebih lanjut. Isu ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat tantangan yang masih dihadapi meskipun sudah ada regulasinya.

Bagian ketiga, “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menggambarkan dinamika pengupahan pada SDM Kesehatan yang dinilai belum adil karena sejumlah tantangan dan kendala, serta kurangnya transparansi. Meskipun berbagai regulasi telah ada, ketidakadilan dalam pengupahan masih terjadi di dunia kesehatan. Isu ini dan perlu perhatian lebih lanjut dan solusi untuk perbaikan sistem ini sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik bagi SDM Kesehatan.

Bagian keempat, “Pengupahan Fleksibel (*Earned Wage Access - Ewa*) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. menawarkan solusi pengupahan fleksibel yang dapat membantu pekerja mengatasi masalah keuangan. Meskipun sistem ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pekerja, penerapannya mungkin menghadapi sejumlah tantangan bagi perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasinya.

Saya mengapresiasi para penulis buku ini atas kontribusi pemikirannya dalam sistem pengupahan pekerja. Semoga semangat untuk terus berkarya dan memberikan sumbangan gagasan guna memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak pernah surut.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Juni 2024

Prof. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D.

KATA PENGANTAR EDITOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah. Berkat anugerah-Nya, Kita masih dalam keadaan sehat dan mampu berkarya hingga hari ini serta berkontribusi dalam berbagai bidang.

Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi editor buku bunga rampai bertema “MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN.” Buku ini ditulis oleh tiga orang Analis Legislatif dan seorang Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya melihat buku ini sebagai karya yang baik dan menarik karena –memberikan khazanah ilmu pengetahuan ketenagakerjaan, khususnya masalah upah pekerja.

Buku bunga rampai ini melihat sistem pengupahan dari berbagai perspektif. Tulisan pertama berjudul “Upah dan Kesejahteraan Pekerja” yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. memberikan pencerahan dan wawasan tentang bagaimana upah pekerja dapat menyejahterakan. Tulisan kedua berjudul “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan” yang ditulis oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si. menyoroti pentingnya pemberian upah secara adil tanpa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, serta berdasarkan profesionalisme dan beban pekerjaan di perusahaan.

Selain kedua tulisan tersebut, terdapat tulisan ketiga yang berjudul “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. mengulas dinamika pengupahan pada SDM Kesehatan yang menghadapi banyak tantangan dan kendala. Untuk itu, diperlukan strategi pengupahan yang adil bagi SDM Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat terus terjaga. Terakhir, tulisan keempat berjudul “Pengupahan Fleksibel (*Earned Wage Access - Ewa*) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. membahas pengupahan fleksibel yang dapat menjadi alternatif pembayaran upah untuk membantu

meringankan beban pekerja, meskipun ada sejumlah potensi kendala bagi perusahaan jika hal itu diterapkan.

Saya menilai buku ini bagus untuk dibaca, bukan saja oleh kalangan Komisi IX DPR RI, melainkan juga oleh masyarakat, terutama para akademisi, praktisi, dan pengamat masalah ketenagakerjaan.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, Juni 2024

B. Purnomo, S.H., M.M., M.H.

PROLOG

Buku bunga rampai dengan tema “MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN” terinspirasi oleh berbagai fakta atas ketidakpuasan pekerja yang sering kali ditunjukkan melalui demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Fenomena ini terjadi setiap tahun, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang masalah mendasar di baliknya dan mengapa isu upah senantiasa menjadi topik hangat yang menggelitik untuk dicermati.

Buku ini ditulis oleh para Analis Legislatif dan Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan khusus penulisan buku ini adalah memberikan masukan pemikiran bagi Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Harapannya, buku ini dapat memberikan pencerahan dan menambah wawasan dalam memahami permasalahan upah pekerja di Indonesia.

Bagian pertama buku ini berjudul “Upah dan Kesejahteraan Pekerja” yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini membahas pentingnya upah dan kesejahteraan pekerja, serta dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Ini merupakan masalah penting untuk diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik. Pertanyaan yang ingin dijawab, yaitu bagaimana sistem pengupahan yang berlaku selama ini, apakah upah pekerja telah menyejahterakannya dan bagaimana sistem pengupahan yang berkeadilan ke masa depan.

Bagian kedua buku ini berjudul “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan” yang ditulis juga oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si., Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini membahas kondisi pengupahan yang masih menunjukkan adanya kesenjangan antara upah pekerja laki-laki dan perempuan. Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah, mengapa terjadi kesenjangan upah tersebut dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

Bagian ketiga buku ini berjudul “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes., Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini mengkaji sistem pengupahan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Namun, sistem pengupahan saat ini dinilai belum dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan dan menawarkan solusi.

Bagian keempat berjudul “Pengupahan Fleksibel (*Earned Wage Access - Ewa*) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. Bagian ini menggambarkan sisi positif dari sistem pengupahan fleksibel yang belum banyak diterapkan oleh perusahaan, serta manfaatnya dalam membantu pekerja mengatasi masalah keuangan.

Secara umum, buku ini menyajikan analisis dari berbagai sisi tentang sistem pengupahan yang ada selama ini. Buku ini juga membahas bagaimana seharusnya sistem pengupahan yang berkeadilan untuk masa depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI..... iii
KATA PENGANTAR
KETUA MAJELIS KEHORMATAN & KOMISIONER DEWAN
JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR PEMBERI KERJA
2024-2029..... v
KATA PENGANTAR EDITORvii
PROLOGix
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR TABEL.....xiii
***EXECUTIVE SUMMARY*..... xiv**
BAGIAN PERTAMA
UPAH DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 1
 A. Pendahuluan..... 1
 B. Upah Pekerja.....2
 C. Kesejahteraan Pekerja.....6
 D. Upah yang Menyejahterakan Pekerja?8
 E. Penutup 17
BAGIAN KEDUA
KESENJANGAN GENDER DALAM PENGUPAHAN..... 21
 A. Pendahuluan.....21
 B. Upah yang Setara22
 C. Kesenjangan Upah Berbasis Gender26
 D. Faktor Penyebab Rendahnya Upah Perempuan29
 E. Penutup32
BAGIAN KETIGA
SISTEM PENGUPAHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN:
PERSPEKTIF, TANTANGAN, DAN SOLUSI.....36
 A. Pendahuluan.....36
 B. Peran SDM Kesehatan dalam Sistem Kesehatan
 Nasional.....38
 C. Konsep Pengupahan dalam Konteks Kesehatan.....42
 D. Tantangan dalam Sistem Pengupahan SDM Kesehatan .47
 E. Solusi Kebijakan Pengupahan.....50

F. Dampak Positif dan Implikasi Kebijakan	52
G. Penutup	56
BAGIAN KEEMPAT	
PENGUPAHAN FLEKSIBEL (<i>EARNED WAGE ACCESS</i>) SEBAGAI	
ALTERNATIF PEMBAYARAN UPAH	60
A. Pendahuluan.....	60
B. Tekanan Upah Minim Para Buruh	62
C. Upah Fleksibel dan Solusi Mengurangi Beban Buruh	72
D. Mekanisme Kerja EWA	75
E. Kendala Implementasi EWA.....	77
F. Penutup	79
EPILOG	84
INDEKS	87
BIOGRAFI PENULIS	90
BIOGRAFI EDITOR.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP)
2024 di 38 Provinsi..... 11

Tabel 1.2. Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita yang
Disesuaikan di 34 Provinsi RI (November 2023) 12

Tabel 2.1. Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut
Jenis Kelamin (Persen)22

Tabel 4.1. Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP)
2024 di 38 Provinsi.....69

EXECUTIVE SUMMARY

Buku bunga rampai dengan tema “MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN” dilatarbelakangi oleh kebijakan upah pekerja yang terus dipermasalahan. Sistem pengupahan di Indonesia masih terus mengalami perubahan, dengan formula terbaru yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, alfa, dan upah minimum berjalan. Meskipun ada plus dan minus dari sistem ini, formula tersebut masih belum memuaskan pekerja karena upah yang diterima belum sepenuhnya dapat menyejahterakan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi antara pihak-pihak terkait dalam penentuan upah agar sistem pengupahan dapat diperbaiki di masa depan. Sistem pengupahan yang berkeadilan adalah sistem pengupahan yang dicapai melalui win-win solution antara pekerja dan pengusaha.

Berbagai peraturan perundangan-undangan dan konvensi internasional telah menjamin kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Namun, kesenjangan upah masih terjadi di tingkat internasional, termasuk di negara-negara maju dan anggota OECD seperti Indonesia. Salah satu faktor penyebab yang paling mendasar adalah nilai-nilai budaya patriarki di dunia kerja. Untuk mengeliminasi atau mengurangi kesenjangan upah, faktor utama tersebut perlu segera diatasi, dengan terus menyosialisasikan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Di sisi lain, pengupahan SDM Kesehatan sangat dipengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tantangan utamanya melibatkan perubahan ekonomi yang cepat, tingginya tingkat inflasi, dan dinamika permintaan SDM Kesehatan di pasar kerja. Kondisi ini memerlukan strategi yang adaptif dan responsif, untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja guna menjaga kelangsungan dan keseimbangan sistem pengupahan. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan pengupahan di sektor kesehatan juga menjadi hambatan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan stakeholders diperlukan untuk merumuskan regulasi yang jelas, konsisten, dan mendukung keberlanjutan pengupahan SDM

Kesehatan. Kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan SDM Kesehatan. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan partisipasi SDM Kesehatan dalam menetapkan kriteria dan prosedur pengupahan sangat diperlukan.

Sementara itu, upah buruh nasional saat ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya. Minimnya upah memaksa buruh untuk berjuang memenuhi kebutuhannya selama satu bulan ke depan, meskipun upah yang diterima sering kali tidak cukup, terutama untuk kebutuhan mendesak. Perusahaan dapat membantu melalui pengupahan fleksibel dengan menerapkan Earned Wage Access (EWA) sebagai alternatif pembayaran upah. Namun, ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi jika EWA diterapkan, di antaranya potensi biaya dalam pemanfaatan; batas maksimum permintaan; masalah data pribadi yang diberikan ke pihak lain; biaya penerapan, kompleksitas, serta pelibatan dan penambahan beban buruh di perusahaan dalam mengaplikasikan sistem EWA.

EPILOG

Secara keseluruhan, pilihan isu yang disajikan dan dikupas dalam buku bunga rampai dengan tema “MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN” menggambarkan sebagian pandangan dan pemikiran tentang sistem pengupahan di Indonesia. Isu yang diangkat dalam buku ini mencakup berbagai aspek, termasuk tantangan dan peluang sistem pengupahan.

Tulisan pada bagian pertama dengan judul “Upah Dan Kesejahteraan Pekerja” menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang berlaku selama ini masih terus mengalami perubahan, terlihat dari perkembangan formula penghitungan upah minimum dari tahun ke tahun. Formula terbaru adalah: *pertumbuhan ekonomi x alfa x upah minimum berjalan*. Meskipun ada kelebihan dan kekurangan dari sistem pengupahan terbaru, formula ini masih belum memuaskan pekerja. Upah pekerja selama ini belum sepenuhnya dapat menyejahterakan pekerja, meskipun penentuan upah telah menggunakan cara yang direvisi berulang kali. Oleh karena itu, perlu adanya kesamaan persepsi antara pihak-pihak terkait dalam penentuan upah, sehingga sistem pengupahan dapat diperbaiki ke depan. Sistem pengupahan yang berkeadilan adalah sistem pengupahan yang dicapai secara *win-win solution* (saling menguntungkan) antara pekerja dan pengusaha, demi keberlangsungan perusahaan.

Tulisan pada bagian kedua dengan judul “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan” menyimpulkan bahwa berbagai peraturan perundangan-undangan dan konvensi internasional telah menjamin kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Namun, faktanya masih terjadi kesenjangan upah di tingkat internasional termasuk di negara-negara maju dan di negara-negara anggota OECD termasuk Indonesia. Salah satu faktor mendasar penyebab kesenjangan upah adalah nilai-nilai budaya patriarki di dunia kerja. Agar kesenjangan upah dapat dieliminasi atau minimal dikurangi pengaruhnya. Faktor utama tersebut perlu segera diatasi, dengan terus menerus menyosialisasikan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Tulisan pada bagian ketiga dengan judul “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” menyimpulkan bahwa pengupahan SDM Kesehatan sangat dipengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tantangan utamanya melibatkan perubahan ekonomi yang cepat, tingginya tingkat inflasi, dan dinamika permintaan SDM Kesehatan di pasar kerja. Dampaknya tidak hanya terasa pada daya beli upah, tetapi juga pada ketersediaan SDM Kesehatan di sektor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan responsif, yang mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja untuk menjaga kelangsungan dan keseimbangan sistem pengupahan. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan pengupahan di sektor kesehatan turut menjadi hambatan. Untuk itu, perlu kerja sama erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan *stakeholders* guna merumuskan regulasi yang jelas, konsisten, dan mendukung keberlanjutan pengupahan SDM Kesehatan. Kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan juga ikut menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan SDM Kesehatan. Dengan demikian, perlu peningkatan transparansi dan partisipasi SDM Kesehatan dalam menetapkan kriteria dan prosedur pengupahan.

Tulisan pada bagian keempat dengan judul “Pengupahan Fleksibel (*Earned Wage Access*) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” menyimpulkan bahwa upah buruh nasional saat ini masih berada pada posisi yang sangat kurang untuk kebutuhan buruh dan keluarganya. Minimnya upah menuntut para buruh berjuang dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya satu bulan ke depan, meski kenyataannya upah yang diterima tidak cukup, terutama saat terdapat kebutuhan mendesak. Perusahaan dapat membantu dengan menerapkan sistem pengupahan fleksibel, seperti *Earned Wage Access* (EWA) sebagai alternatif pembayaran upah. Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi jika sistem ini diterapkan, seperti potensi biaya dalam pemanfaatan; batas maksimum dalam permintaan; masalah data; biaya penerapan, kompleksitas, dan penambahan beban pekerja untuk mengaplikasikan sistem EWA.

Analisis yang komprehensif para Analis Legislatif dan Analis Kebijakan yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat semakin memperluas kekayaan pengetahuan pembaca tentang sistem pengupahan yang berkeadilan. Gagasan dan informasi yang disampaikan melalui buku ini diharapkan juga mendorong keseriusan Komisi IX DPR RI dan pemerintah dalam membuat kebijakan pengupahan di masa yang akan datang. Buku ini diharapkan dapat membuka peluang yang semakin luas bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja.

INDEKS

- A**
- Analisis, ii
Aplikasi, 75, 78
Atas, ii, iii
- B**
- Badan Pusat Statistik, 12, 13,
21, 22, 33, 60, 81
Berbasis, 26
Biaya, 13, 15, 77
Buruh, 19, 23, 24, 62, 72, 75,
82
- C**
- Cadangan, 61
Covid-19, 29, 60, 66, 92, 93, 96
- D**
- Dana, 61, 93
Development, 26, 27, 61
DPR RI, iii, iv, v, vii, viii, ix, 2,
18, 32, 38, 57, 80, 86, 90, 91,
92, 94, 96, 98
- E**
- Edukasi, 41
Ekonomi, 27, 59
EWA, iii, xv, 62, 73, 74, 75, 77,
78, 80, 81, 85
- F**
- Faktor, 15, 29, 48, 84
- Fisik, 4
Fleksibel, iii, vi, vii, x, 72, 85
Formula, 1, 84
- G**
- Gaji, 76, 82
Gender, iii, v, vii, ix, 26, 30,
33, 84, 94, 95
Goals, 26
- H**
- Hak, ii
Harapan, 2, 16, 65, 95
- I**
- ILO, 24, 25, 32, 33
Indonesia, ii
- J**
- Jasa, 71
- K**
- Kabupaten, 4, 90, 100
Kebijakan, iii, vii, ix, 15, 16,
23, 41, 43, 50, 52, 54, 86, 91,
92, 94, 95, 97, 98
Kebutuhan, 4, 65, 66, 73, 91
Kerja, ii, xiii, xiv, 4, 5, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 32, 43, 47, 50,
59, 60, 70, 75, 90, 91, 92, 93,
96, 97
Kesehatan, iii, vi, vii, x, xiv,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 85,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97
Kesejahteraan, iii, v, vii, ix, x,
6, 7, 8, 52, 55, 84, 90, 91, 92,
93, 94, 96, 98
Keselamatan, 91, 93, 96, 97
Kesenjangan, iii, v, vii, ix, 26,
27, 28, 33, 34, 84
Kesepakatan, 17
Kesetaraan, 24, 25, 32, 94
Ketenagakerjaan, 5, 22, 32,
70, 79, 91, 93
Keuangan, 62, 71, 93
KFM, 4
KHL, 1, 3, 4, 5, 8, 17
Kinerja, 98
Kolaborasi, 7
Komisi, iv, viii, ix, 2, 18, 38,
57, 86, 96
Komponen, 4, 43
Kontribusi, 39, 55
Konvensi, 24, 25, 32, 33
Kota, 4, 81, 100

L

Layanan, 91

M

Masyarakat, 91, 92, 96, 98, 99
Minimum, xiii, 1, 4, 5, 6, 69

O

OECD, xiv, 27, 32, 34, 84
Orang, 90

P

Partisipasi, 41, 60
Pekerja, iii, v, vii, ix, 2, 5, 6, 8,
16, 17, 23, 24, 25, 32, 66, 74,
84, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
100
Pelayanan, 39, 40
Pembayaran, iii, vi, vii, x, 80,
85
Pemberi kerja, 15
Pemerintah, 5, 8, 15, 22, 23,
24, 25, 32, 47, 59, 68, 70, 72,
92, 93, 95, 96, 98
Pendapatan, 33, 61, 79
Penduduk, 60
Penelitian, 37, 41, 90, 91
Penentuan, 44
Pengawasan, 98
Pengelolaan, 40, 98
Pengeluaran, xiii, 12, 13, 20
Pengembangan, 41, 93
Pengupahan, iii, v, vi, vii, ix,
x, 1, 5, 6, 9, 24, 32, 42, 43,
45, 46, 47, 50, 55, 56, 59, 64,
68, 78, 80, 84, 85, 100
Pengusaha, 2, 5, 16, 23, 24,
50, 100
Peningkatan, 49, 51, 52, 53,
54
Penyelenggaraan, 95, 96
Peraturan, 22, 23, 59, 70, 71
Perempuan, 21, 22, 24, 25, 26,
29, 32, 33, 34, 94, 95
Perubahan, 4, 5, 6, 9, 24, 32,
56, 68
Perusahaan, xv, 62, 76, 79, 85,
100

Pinjol, 71, 72
Prinsip, 25, 42, 93
Produktivitas, 91
Provinsi, xiii, 1, 9, 11, 12, 61,
68, 69, 72, 81, 90, 95
Pusat, ii

R

Rata-rata, 22, 26, 28
Responsif, 95
Riil, xiii, 12
Rumusan, 1

S

Sakernas, 21, 27, 29, 60
SDGs, 26, 34
Sentralitas, 39, 40
Serikat, 5, 14, 15, 23, 27, 61,
74
Sistem, iii, vi, vii, x, xiv, 17,
18, 19, 36, 37, 38, 43, 47, 56,
59, 64, 65, 75, 84, 85, 93, 96,
97
Solusi, iii, vi, vii, x, 50, 72, 85,
92
Struktur, 23
Survei, 14, 21, 60, 71

Sustainable, 26

T

Tantangan, iii, vi, vii, x, xiv,
47, 48, 56, 57, 85
TPAK, 21, 33, 60

U

UMK, 4, 8, 9, 17, 81
UMP, xiii, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 17, 19, 66, 68, 69, 70, 81
UN Women, 26
Undang-Undang, 21, 22, 24,
32, 36, 59, 70, 90, 91, 93, 94,
96, 97
Upah, iii, v, vi, vii, ix, x, xiii, 1,
2, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 42,
43, 48, 50, 54, 59, 62, 63, 65,
69, 72, 84, 85, 93
Upaya, 45, 62, 91, 93, 96
Urgensi, 59
UU, 5, 22, 24, 25, 31, 32, 36,
43, 47, 50, 70, 82, 93

W

World Economic Forum, 26

BIOGRAFI PENULIS



hartini.retnaningsih@dpr.go.id

hartiniretnaning@yahoo.com

tinipeneliti@gmail.com

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. seorang Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Beliau menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri Karang 1, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tahun 1977; SMP Negeri 1 Wedi, Klaten, Jawa Tengah, tahun 1981; SMA Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah, tahun 1984; S1 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 1990; S2 Jurusan Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Jakarta, tahun 2000; dan S3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI, Jakarta, tahun 2016.

Beliau telah menulis sejumlah buku tentang kesejahteraan sosial, beberapa publikasi terbaru antara lain sebagai berikut.

1. *“Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”*, Penerbit: Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, bekerja sama dengan Inteligensia Intrans Publishing, Malang, Anggota IKAPI Jatim, 2017, ISBN: 978-602-5562-03-7.
2. *“Prospek Kesejahteraan Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”*, Penerbit: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, bekerja sama dengan Inteligensia Intrans Publishing, Malang, Anggota IKAPI Jatim, 2020, ISBN: 978-623-6548-62-2.
3. *“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Orang Kaya”*, Penerbit: Pusat Analisis Keparlemenan Badan

Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, bekerja sama dengan Penerbit Omera Pustaka, Banyumas, Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2023, ISBN: 978-623-141-111-2.

Ada juga publikasi terbarunya yang merupakan bagian dari buku antara lain sebagai berikut.

1. “Program Jaminan Hari Tua dan Upaya Kesejahteraan Pekerja”, dalam Buku *“Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Parlemen”*, Editor: Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T., Penerbit: Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta bekerja sama dengan Inteligencia Intrans Publishing, Malang, Anggota IKAPI Jatim, 2017, ISBN: 978-602-5562-10-5.
2. “Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan (Analisis untuk Daerah Kepulauan)”, dalam Buku *“Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Daerah Kepulauan: Perspektif Kesejahteraan Sosial”*, Editor: Rr. Endah Sulistyaningsih, Penerbit: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, bekerja sama dengan Inteligencia Intrans Publishing, Malang, Anggota IKAPI Jatim, 2018, ISBN: 978-602-53821-1-6.
3. *“Universal Health Coverage (UHC) dan Pemanfaatan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional”*, dalam Buku *“Universal Health Coverage (UHC): Perspektif Kesehatan dan Kesejahteraan”*, Editor: Abu Huraerah, Penerbit: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, bekerja sama dengan Inteligencia Intrans Publishing, Malang, Anggota IKAPI Jatim, 2019, ISBN: ISBN: 978-623-92324-3-6.
4. “Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Produktivitas dan Kesejahteraan”, dalam Buku *“Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Analisis Prospektif Menuju Revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja”*, Editor: Soehatman Ramli, DIPL, SM, SKM, MBA, Penerbit: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, bekerja sama dengan Penerbit Omera Pustaka, Banyumas, Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2023, ISBN: 978-623-141-116-7.

Selain itu, ada beberapa artikel yang dihasilkannya dan beberapa publikasinya yang terbaru antara lain sebagai berikut.

1. "Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Rumah Sakit", *Info Singkat*, Vol. XI, No. 01/I/Puslit/Januari 2019, ISSN: 2088-2351.
2. "Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Wacana Kartu Pra-Kerja (Sebuah Kritik untuk Presiden Jokowi)", *Parliamentary Review*, Vol. I No. 2, Juni (2019), 65-72, ISSN: 2656-923X.
3. "Mencari Solusi atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020", *Info Singkat*, Vol. XII, No.2/II/Puslit/Januari/2020.
4. "Kesejahteraan Pekerja dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja", *Parliamentary Review*, Vol. II No. 1 (2020), 21-29, ISSN: 2656-923X.
5. "Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 11, No. 2 Desember 2020, 215-227, ISSN: 2086-6305.
6. "Permasalahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Memberatkan Masyarakat", *Info Singkat*, Vol. XIII, No. 1/I/Puslit/Januari/2021, ISSN: 2088-2351.
7. "Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka Pasca-Setahun Covid-19", *Parliamentary Review*, Vol. III No. 2 (2021), 51-59, ISSN: 2656-923X. (Tulisan bersama Yulia Indahri).
8. "Operational Improvement on Data Validation and Verification of Health Insurance Assistance Beneficiaries in Indonesia: An Overview of Accountability/Governance Perspective", *Psychology and Education*, (2021) 58 (1): 2236-2247, ISSN: 00333077. (Tulisan bersama Herlan & Bambang Shergi Laksmono).
9. "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 12, No. 2 Desember 2021, 237-253, ISSN: 2086-6305.
10. "Rencana Penghapusan Kelas Peserta BPJS Kesehatan", *Info Singkat*, Vol. XIV, No. 1/I/Puslit/Januari/2022, ISSN: 2088-2351.

11. "Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional", *Parliamentary Review*, Vol. IV No. 1 (2022), 1-7, ISSN: 2656-923X.
12. "Democratic Governance Strengthening in The Implementation of Data Validation and Verification of Health Insurance Contributions Recipients", *International Journal of Business and Technology Management*, e-ISSN: 2682-7646 | Vol.4, No. 1, 59-69, 2022. DOI: <https://doi.org/10.55057/ijbtm.2022.4.1.7> (Tulisan bersama Herlan & Bambang Shergi Laksmono).
13. "Pro Kontra Dana Jaminan Hari Tua dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan", *Info Singkat*, Vol. XV, No. 2/II/Puslit/Januari/2023, ISSN: 2088-2351.
14. "Upah Pekerja dalam Prospek Kesejahteraan: Perspektif UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja", *Parliamentary Review*, Vol. V No. 1 (2023), 17-24, ISSN: 2656-923X.
15. "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri", *Parliamentary Review*, Vol. V No. 3 (2023), 113-119, ISSN: 2656-923X.
16. "Undang-Undang Cipta Kerja Mengabaikan Kesejahteraan Pekerja?", *Kajian Policy Brief*, Vol. XXVIII No. 4 2023, 223-228, ISSN: 0853-9316.
17. "Rencana Penerapan KRIS dan Dampaknya terhadap Iuran BPJS Kesehatan", *Info Singkat*, Vol. XVI, No. 2/I/Pusaka/Januari/2024, ISSN: 2088-2351.
18. "Perspektif Kesejahteraan Pekerja dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", *Parliamentary Review*, Vol. VI No. 1 (Maret 2024), 31-39, ISSN: 2656-923X.



sali.susiana@dpr.go.id
susianasali@gmail.com
sali_susiana@yahoo.com.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si., seorang Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Lahir di Jakarta, 13 April 1971. Pendidikan sarjana dari Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1995) dan Magister dari Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2005).

Beliau menjadi anggota tim asistensi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain sebagai berikut.

1. Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia (2011).
2. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (2011).
3. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2012).
4. Tim pendamping Tim Pengawas DPR RI untuk Perlindungan TKI (2015-2019, 2013-2014).
5. RUU tentang Penyandang Disabilitas (2015).
6. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (2015-2019; 2022).
7. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (2023).

Beliau telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan isu gender dan perempuan, antara lain sebagai berikut.

1. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Proses Legislasi dan Penyusunan Anggaran (2008).
2. Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penanganan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan (2012).

3. Rekrutmen Perempuan Calon Anggota DPRD Provinsi: Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 (2013).
4. Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (2014).
5. Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Perempuan (2015).
6. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Hak Perempuan Adat (2017), Pemenuhan dan Pelindungan Hak Pekerja Perempuan (2016).
7. Efektivitas Pemeriksaan Kandungan Bagi Ibu Hamil pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu (2018).

Selain itu, beliau juga menjadi editor dan kontributor dari buku yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan dan menulis beberapa artikel mengenai isu perempuan dan gender pada jurnal ilmiah dan surat kabar. Menulis buku antara lain sebagai berikut.

1. Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan (2012).
2. Representasi Perempuan di Parlemen (2013).
3. Pelindungan TKI Perempuan Sektor Informal (2016).
4. Legislasi Berperspektif Gender (2021).



tririnipl@gmail.com

Tri Rini Puji Lestari, SKM. M.Kes, seorang Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1997 dan S2 pada tahun 2004 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sejak tahun 2000 aktif melakukan pendampingan substansi kepada anggota Komisi IX DPR RI serta melakukan penelitian dan kajian ilmiah seputar isu kebijakan kesehatan masyarakat yang hasilnya diterbitkan maupun tidak diterbitkan secara *online* atau *offline*.

Beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Bencana, dalam buku *Penanggulangan Bencana*, 2019.
2. Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 11, No. 1, 2020.
3. Kepatuhan Masyarakat terhadap PPKM Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Parlementary Review*, Vol. III, No. 3, 2021.
4. Pencapaian Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui Pendekatan Siklus Hidup Dalam Kesehatan Reproduksi dalam buku *Kesejahteraan Ibu dan Anak*, 2023.
5. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja dalam buku *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Analisis Prospektif Menuju Revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja*, 2023.

6. Transformasi Kebijakan Kesehatan: Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Kesehatan, *Policy Brief Vol. XXVIII No. 3*, 2023.
7. Analisis Perbandingan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Singapura, Jepang, dan Norwegia, *Foreign Legislation Analysis (FLA)*, 2023.



efendimuhayar@gmail.com

Efendi, S.Sos., M.AP., seorang Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Lahir di Jakarta, tanggal 5 September 1970. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Jurusan Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara Jakarta, tahun 2000, dan menyelesaikan Pendidikan S-2 di Universitas Nasional Jakarta tahun 2018. Pengalaman tugas sebagai Analis Kebijakan, ditempatkan di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Beliau telah melakukan kajian-kajian kebijakan sebagian besar berkaitan dengan kebijakan/evaluasi kebijakan dalam lingkup internal Sekretariat Jenderal DPR RI, antara lain sebagai berikut.

1. Kajian kebijakan tentang Pengaduan Masyarakat di Setjen DPR RI.
2. Kajian kebijakan tentang Izin Belajar PNS Setjen DPR RI.
3. Evaluasi Persekjen tentang Pakaian Dinas Harian PNS Setjen DPR RI.
4. Evaluasi Persekjen No. 16 tahun 2016 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-PNS.

Selain itu, juga telah menulis buku tentang Politik Pengawasan Kebijakan DPR RI antara lain sebagai berikut.

1. Menyoal Kebijakan Penghapusan 5,2 Juta Penerima PBI dan Kenaikan BPJS, tahun 2020.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI, tahun 2020.
3. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, tahun 2023.

Adapun tugas-tugas lain di luar tugas pokoknya sebagai analis kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Ketua Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

BIOGRAFI EDITOR



B. Purnomo, S.H., M.M., M.H., bimo.ayul@gmail.com seorang praktisi sumber daya manusia khususnya bidang hubungan industrial di perusahaan swasta. Lahir di Magetan, Jawa Timur, tanggal 19 Maret 1970. Aktif di Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi sebagai Sekretaris dan

Anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Bekasi, Jawa Barat. Menyelesaikan Pendidikan SD hingga SMP di Maospati, Kabupaten Magetan; SMK Negeri 2 Kota Madiun; S1 Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta; S2 Jurusan Manajemen, STIE Swadaya Jakarta; S2 Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana; dan saat ini tengah menempuh pendidikan S3 Jurusan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Senang mengajar dan aktif berbagi ilmu di forum APINDO dan di beberapa perguruan tinggi. Mendalami hukum ketenagakerjaan, sehingga karya ilmiah sebagai tugas akhir menyelesaikan studi semuanya terkait dengan permasalahan hukum ketenagakerjaan.

1. Skripsi: “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Bidang Hubungan Industrial yang Mengakibatkan Pembatalan atas Surat Pengunduran Diri Pekerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus.PHI/2019)”.
2. Tesis: “Perselisihan Hak Terkait Pesangon Direksi yang Diangkat dari Pekerja di Perusahaan yang Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.MDN dan Putusan Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”.
3. Rencana Proposal Disertasi masih dalam konteks hukum ketenagakerjaan.

Buku Bunga Rampai

MENUJU SISTEM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN

Masalah upah pekerja selalu menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan. Setiap saat, pekerja menyuarakan tuntutan kenaikan upah yang adil bagi pekerja, sementara pengusaha harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keberlanjutan operasional perusahaan. Di sisi lain, kebijakan upah pekerja melibatkan berbagai aspek dan sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Buku ini membahas berbagai isu permasalahan upah pekerja. Bagian pertama, “Upah dan Kesejahteraan Pekerja” yang ditulis oleh Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. merupakan bagian yang menarik untuk dicermati. Penulis membahas hubungan antara upah yang layak dengan kesejahteraan pekerja. Upah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan dampaknya terhadap produktivitas.

Bagian kedua, “Kesenjangan Gender dalam Pengupahan” yang ditulis oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si. menyoroti pentingnya kesetaraan upah pekerja laki-laki dan perempuan. Meskipun berbagai regulasi telah menjamin hal tersebut, faktanya ketimpangan masih terjadi dan perlu perhatian lebih lanjut. Isu ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat tantangan yang masih dihadapi meskipun sudah ada regulasinya.

Bagian ketiga, “Sistem Pengupahan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perspektif, Tantangan, dan Solusi” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menggambarkan dinamika pengupahan pada SDM Kesehatan yang dinilai belum adil karena sejumlah tantangan dan kendala, serta kurangnya transparansi. Meskipun berbagai regulasi telah ada, ketidakadilan dalam pengupahan masih terjadi di dunia kesehatan. Isu ini dan perlu perhatian lebih lanjut dan solusi untuk perbaikan sistem ini sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik bagi SDM Kesehatan.

Bagian keempat, “Pengupahan Fleksibel (Earned Wage Access - Ewa) sebagai Alternatif Pembayaran Upah” yang ditulis oleh Efendi, S.Sos., M.A.P. menawarkan solusi pengupahan fleksibel yang dapat membantu pekerja mengatasi masalah keuangan. Meskipun sistem ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pekerja, penerapannya mungkin menghadapi sejumlah tantangan bagi perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasinya.

